

Ikhtisar Webinar

Prospek Normalisasi Hubungan Diplomatik Arab Saudi-Israel



Prospek Normalisasi Arab Saudi-Israel

21 Juni 2023 | 10.00 - 12.00 WIB

Webinar Prospek Normalisasi Arab Saudi-Israel dibuka oleh Andi Widjajanto, Penasihat Senior Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45). Sesi ini menghadirkan tiga pembicara, yakni: 1) Broto Wardoyo, Staf Pengajar Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia sebagai bagian dari Tim Penulis Monograf; 2) Muhammad Luthfi Zuhdi, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia; dan 3) Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua Hubungan Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia; serta dimoderatori oleh Diyauddin, Analis Utama Maha Data Laboratorium Indonesia 2045.

Andi Widjajanto memberikan sambutan dengan menyampaikan bahwa Timur Tengah merupakan hal yang rumit, namun memiliki kajian yang semakin berkembang dalam studi Ilmu Hubungan Internasional. Beliau menggarisbawahi meluasnya kajian dalam konteks kultural, hubungan lintas batas, dan kajian futuristik yang melihat prospek serta potensi. Dalam konteks hubungan negara Arab dan Israel, beliau menemukan adanya stagnasi pola perdamaian di Timur Tengah yang masih terus menjadi fokus observasi para pengamat politik-keamanan. Sebagai penutup sambutan, Beliau menaruh harapan agar kajian yang dilakukan oleh LAB 45 ini akan mampu memperkaya pemahaman dan mempersiapkan diri terkait antisipasi dinamika hubungan Arab Saudi dan Israel kedepannya.

Mengawali bahasan, Broto Wardoyo menyampaikan bahwa ada beberapa titik penting dalam hubungan negara Arab dan Israel yang umumnya dijadikan sebagai patokan analisis: 1) Camp David Accord tahun 1978, saat Mesir mulai melakukan normalisasi dengan Israel; 2) Declaration of Principle tahun 1993, saat Palestina (PLO) memutuskan untuk melakukan normalisasi dengan Israel; 3) Wadi Araba Treaty tahun 1994, saat Yordania menyusul melakukan normalisasi dengan Israel; dan 4) Abraham Accords tahun 2020, ketika Uni Emirat Arab dan beberapa negara Arab lainnya memutuskan untuk melakukan normalisasi. Melihat pola tersebut, muncul pertanyaan seputar negara yang selanjutnya menyusul. Melihat adanya pola dan gestur terbuka yang ditunjukkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, muncul spekulasi bahwa negara selanjutnya yang akan menormalisasikan hubungan dengan Israel adalah Arab Saudi. Kita dapat melihat pola yang ada, menerjemahkan menjadi proyeksi akan probabilitas normalisasi dua negara tersebut, dan melihat dampak yang dapat terjadi pada Palestina dan Indonesia saat hal tersebut benar terjadi. Oleh karena itu, kajian literatur dilakukan dengan melihat bahasan tiga (Camp David Accord, Wadi Araba Treaty, dan Abraham Accords) perundingan terdahulu untuk mengidentifikasi pola normalisasi negara Arab non-Palestina. Broto Wardoyo kemudian menyampaikan bahwa dari ketiga perundingan tersebut, terdapat beberapa kesamaan yang dapat ditarik: 1) prosesnya tidak pernah tiba-tiba, selalu ada pendahuluan yang cukup panjang, dan selalu melibatkan pihak ketiga yang merupakan *great power*/negara besar; 2) kondisi domestik negara Arab yang mempengaruhi, bukan kondisi domestik Israel; 3) Amerika Serikat selalu memberikan dukungan dan tidak ada negara besar lain yang menentang usulan tersebut.

Melihat pola normalisasi, hubungan Arab Saudi dan Israel sudah berlangsung cukup lama, dimulai pada tahun 1960an yang diawali dengan kerja sama intelijen secara tertutup. Hubungan tersebut kemudian perlahan berkembang dan meluas sektornya, tidak lagi sekadar hubungan kerja sama intelijen, meskipun masih harus melibatkan pihak ketiga. Iran turut memainkan peran penting: kedua negara sama-sama merasa terancam akan eksistensinya. Kondisi domestik Israel ini didominasi oleh kelompok sayap kanan yang cenderung tidak memperlakukan isu luar negeri, kecuali Palestina. Isu normalisasi dengan Arab Saudi dianggap tidak terlalu penting, meskipun Perdana Menteri Netanyahu mengekspresikan sebaliknya. Sedangkan kondisi domestik Arab Saudi, pasca berkuasanya Raja Salman, terdapat konsolidasi kekuasaan oleh Muhammad bin Salman (MBS) yang saat ini sudah mencapai kondisi relatif stabil. MBS tidak terlalu memikirkan isu-isu ideologis, lebih ke modernisasi. Broto Wardoyo kemudian mengungkap salah satu temuan hasil wawancara narasumber, bahwa tindakan MBS tidak ditentang oleh kelompok akar rumput dan terlihat kembali menuju modernisasi. Lebih lanjut, bahasan masuk lebih dalam berfokus pada kebijakan negara besar atau dalam konteks ini adalah Amerika Serikat di Timur Tengah. Salah satu yang menjadi masalah adalah Amerika Serikat terlihat mengurangi perhatiannya dalam kawasan tersebut, sehingga muncul kekhawatiran bahwa negara Arab akan ditinggalkan dan kehilangan payung keamanannya. Inilah yang dapat menjawab perilaku negara Arab yang berubah drastis terhadap satu sama lain, munculnya kebutuhan untuk bertahan sendiri atau mencari mitra yang baru. Di sisi lain, Cina juga memiliki andil dalam konteks isu kawasan Timur Tengah. Beberapa penanda yang penting ialah: 1) Cina memfasilitasi normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Iran, karena dorongan kepentingan ekonomi; 2) Cina memiliki lini masa hubungan yang relatif sama dengan Arab Saudi dan Iran, meski tidak terlihat mengarah pada politik-keamanan; serta 3) Cina tidak menunjukkan gelagat anti terhadap isu normalisasi Arab Saudi dengan Israel.

Broto Wardoyo kemudian melanjutkan bahasan terkait dampak normalisasi dengan tiga poin penting. **Pertama**, normalisasi hubungan diplomatik akan memerlukan keterlibatan Amerika Serikat. Posisi negosiasi Arab Saudi saat ini sudah lebih baik, dibandingkan dengan sebelum Cina masuk dalam diskusi normalisasinya dengan Iran, sehingga Arab Saudi dapat menuntut payung keamanan dari Amerika Serikat serta akses pengembangan teknologi nuklir. **Kedua**, normalisasi dengan Arab Saudi jelas akan memberikan posisi politik lebih kuat untuk Israel. Efek bola salju dari pengakuan Arab Saudi akan mendorong negara Arab lainnya untuk melakukan hal serupa. **Ketiga**, meski normalisasi dengan Israel tidak akan mengganggu legitimasi MBS, bisa jadi justru tidak cukup penting untuk dilakukan. Hal tersebut mengacu pada menurunnya ancaman dari Iran akibat normalisasi hubungan diplomatik yang lebih dulu terjadi. Jika ketiga hal tersebut akan mendorong normalisasi, maka penting juga untuk melihat dampaknya pada Palestina. Perilaku dukungan dari negara Arab cenderung berkurang, dibandingkan dengan konsistensi dukungan dari Indonesia. Dengan demikian, dampak yang akan muncul ialah pertaruhan bantuan Arab Saudi bagi Palestina, jejaring kelompok kemerdekaan Palestina akan terbengkalai, dan API menjadi dipertanyakan akibat ketidakjelasan proses perdamaian. Terakhir, Broto Wardoyo juga menyampaikan dampak normalisasi terhadap Indonesia: penekanan terhadap Arab Saudi dan jejaringnya di Indonesia—gejolak politik menjadi lebih minim—serta sekaligus membuat gejolak isu Palestina menjadi semakin tinggi karena menguatnya Netanyahu beserta kebijakan garis kerasnya.

Menutup bahasan, Broto Wardoyo kemudian menyampaikan beberapa rekomendasi. **Pertama**, dengan mempertimbangkan bahwa hubungan diplomatik Arab Saudi-Israel akan membawa kemudahan posisi Indonesia dalam masalah Palestina, kampanye yang lebih terstruktur mengenai hal tersebut perlu dipertimbangkan serius. **Kedua**, Pemerintah Indonesia perlu mendorong pengamatan yang lebih serius dalam masalah Palestina dan Israel dengan menugaskan individu atau tim khusus, mengingat justifikasi kepemimpinan Netanyahu akan berpotensi memudahkan situasi buruk di Tepi Barat dan Palestina. Mengingat beberapa kelompok di Indonesia seringkali memanfaatkan gejolak di Palestina, kegaduhan di Indonesia akan semakin mudah terjadi dalam situasi menjelang pemilihan umum. Penugasan yang dimaksud juga dapat sekaligus memberikan justifikasi ke publik bahwa Pemerintah Indonesia memberikan dukungan pada Palestina. **Ketiga**, implikasi global yang dihasilkan normalisasi Arab Saudi-Israel tidak terlalu besar—penolakan dari negara-negara besar tidak akan dominan termasuk dari Cina meskipun Amerika Serikat kembali ke Timur Tengah—yang membuat stabilitas dapat lebih terjaga dan Indonesia dapat lebih tenang dalam menentukan prioritas globalnya. **Keempat**, Pemerintah Indonesia dapat mempersiapkan diri, mengingat pendukung dari kelompok-kelompok mitra Iran relatif banyak. Hal ini mengacu pada dampak normalisasi Arab Saudi-Israel yang akan mempengaruhi posisi politik Iran dan mitra aliansinya. **Terakhir**, mengingat adanya dampak normalisasi terhadap hubungan intra-Palestina, Pemerintah Indonesia dapat mendorong dialog intra-Palestina yang lebih intens dan mendalam.

Menanggapi paparan, selanjutnya Prof. Muhammad Luthfi Zuhdi menggarisbawahi anomali politik di Timur Tengah. Negara Arab saling berkonflik satu sama lain cukup lama, lalu mereka sendirilah yang mendadak ingin berdamai dengan satu sama lain. Terkait hubungan Israel-Palestina, Presiden Turki Erdogan adalah sosok yang paling depan dalam menyuarakan dukungannya pada Palestina. Padahal, Turki merupakan salah satu negara yang paling lama menjalin hubungan dengan Israel. Saat ini, Turki bukan tidak lagi memiliki hubungan dengan Israel, melainkan hanya menurunkan hubungan bilateral keduanya dan tidak banyak diketahui masyarakat luas. Oleh karena itulah, orang Indonesia seringkali menganggap Presiden Erdogan sebagai pahlawan dalam melawan Israel. Lebih lanjut, Prof. Luthfi Zuhdi menyinggung hubungan Israel-Saudi, terutama dengan naiknya MBS dalam pucuk kepemimpinan Arab (Vision 2030). 90 persen dari tujuan tersebut ialah tujuan ekonomi dan mendatangkan lebih banyak devisa negara dengan cepat. Dampaknya, Saudi terlihat lebih pragmatis. Pergolakan dalam negeri ini kemudian membuka kesempatan untuk lebih banyak hubungan dengan Israel, bukan diplomatik, melainkan hubungan lainnya. Terlebih lagi, ancaman dari Israel tidak lebih besar daripada ancaman dari Iran. Kemudian, Beliau menyinggung beberapa pendorong normalisasi Arab Saudi-Israel, seperti kunjungan Presiden Joe Biden ke Saudi yang mengisyaratkan dukungan dan hubungan baik serta penandatanganan normalisasi Arab Saudi dengan Iran di Beijing awal tahun ini.

Lebih lanjut, terdapat beberapa poin yang memungkinkan terjadinya persahabatan Israel-Saudi: 1) perubahan pandangan terhadap Saudi, namun hubungan diplomatik tidak dapat dilakukan sebelum negara Palestina berdiri dengan Ibukota Jerusalem Timur; 2) adanya pembukaan hubungan diplomatik antara Israel dan beberapa negara Arab sebelumnya; 3) adanya usaha Pemerintah Saudi untuk menekan kebencian terhadap agama lain, termasuk Yahudi, dalam kurikulum dan buku pelajaran; 4) berkurangnya serangan fanatisme pembela

Islam akibat ajakan Kementerian Arab Saudi; 5) partisipasi Muhammad al-Isa (Ketua Liga Arab) dalam peringatan 75 tahun *Holocaust* di Auschwitz; 6) keikutsertaan Israel dalam Reli Dakar di Saudi pada tahun 2011; serta 7) penyebutan Israel sebagai ‘sekutu yang akan datang’ oleh MBS. Namun demikian, terdapat beberapa poin yang menghambat: 1) sulitnya mengetahui pendapat masyarakat Saudi—setuju atau tidaknya—akibat sistem negaranya yang monarki; 2) masih sulit bagi masyarakat Saudi untuk mengesampingkan masalah Palestina; 3) dinamika di dalam Saudi tidak sama cepat dengan yang terjadi di Bahrain dan Uni Emirat Arab; 4) jika nantinya akan ada penerbangan Haji dari Israel langsung ke Saudi, belum tentu akan sampai pada pembukaan hubungan diplomatik keduanya; 5) normalisasi Arab-Iran mengurangi kekhawatiran akan ancaman Iran; 6) normalisasi Arab Saudi-Israel akan membuka kesempatan bagi para musuh untuk menjatuhkan MBS; 7) normalisasi keduanya akan menaikkan daya tawar Saudi terhadap Amerika Serikat, membuat Saudi dapat melakukan negosiasi terkait pengembangan teknologi nuklir; serta 8) masih berkuasanya kelompok kanan di Israel yang menentang damai dengan negara yang bekerjasama dengan musuhnya.

Menutup sesi tanggapannya, Prof. Luthfi Zuhdi menyampaikan kesimpulannya. Menurutnya, pembukaan hubungan diplomatik antara Saudi dan Israel belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Hubungan Saudi dan Iran yang semakin meluas dan mendalam akan mengisi kekosongan kekuatan Amerika Serikat di Timur Tengah. Meski begitu, kelompok Saudi-Iran belum akan memicu ketegangan dengan Israel akibat sibuknya urusan dalam negeri. Arab Saudi sendiri akan tetap menjalin hubungan baik dengan Israel, yang terefleksikan dengan pembukaan jalur udara bagi penerbangan Israel.

Sesi tanggapan kemudian dilanjutkan oleh Prof. Sudarnoto yang juga mengawali bahasannya dengan menggarisbawahi hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim. Menurutnya, penting untuk membuat gambaran terkait isu normalisasi Saudi-Israel yang akan berpengaruh terhadap negara lainnya untuk kemudian dibuat kebijakan dan Beliau mengapresiasi riset yang dilakukan secara komprehensif ini. Meski riset ini sudah mampu mengangkat kompleksitas isunya, Beliau menyarankan bahwa sebaiknya ‘Teori Diplomasi’ disebutkan dalam naskah penelitian. Tidak hanya itu, Prof. Sudarnoto juga menekankan penggunaan *Multidimensional Approach* (MA) untuk dapat menyentuh seluruh aspek multidimensi yang hadir dalam dinamika isu normalisasi Arab Saudi dan Israel. Lebih lanjut, Beliau memberikan beberapa pertimbangan dorongan normalisasi: 1) pertimbangan keamanan, Iran dan Israel menjadi sentral; serta 2) pertimbangan ekonomi, Israel menjadi sentral.

Prof. Sudarnoto kemudian masuk dalam fokus terkait dengan posisi Indonesia. Menurutnya, Pemerintah Indonesia melakukan ‘*Megaphone Diplomacy*’ dengan mengerahkan kekuatan masyarakat sipil dan komunitas pembela Palestina dalam bahasan kebijakan Pemerintah Israel yang cenderung merampas kedaulatan Palestina. Pemerintah Indonesia juga memanfaatkan forum multilateral, seperti PBB dan OKI, untuk mendorong pembebasan Palestina yang juga tergambarkan dengan aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat akar rumput. Selain dukungan simbolik, Indonesia juga memberikan dukungan secara material, terutama untuk kebutuhan darurat korban perang. Menutup tanggapannya, Prof. Sudarnoto kembali menekankan bahwa masih terdapat banyak hal yang perlu dibicarakan terkait dengan normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel, karena kompleksitas dan implikasinya yang sangat luas.

QnA

Pertanyaan: Terkait syarat normalisasi dengan Israel, yakni penyelesaian isu Palestina, model apakah yang diinginkan oleh Arab Saudi, apakah one state solution atau two state solution? Bagaimana tanggapan kelompok politik di Palestina?

Broto Wardoyo: Basis penyelesaian masalah Palestina yang digunakan secara internasional adalah solusi dua negara. Perdebatannya adalah negaranya ada dimana? Saudi juga masih menggunakan solusi dua negara. Interview kami menunjukkan bahwa kelompok-kelompok di Israel dan Palestina memahami masalahnya apakah mereka masih bersepakat dengan basis dua negara? Jawabannya agak berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Jika kita melihat survey PSR sebagian besar publik Palestina tidak tertarik atas solusi dua negara. Ini bisa dipahami karena mereka mendapatkan realita yang tidak terlalu baik sejak Oslo Accord. Narasi ini muncul di kelompok muda. Di Israel kelompok sayap kanan (tidak terlalu memikirkan Palestina), kebijakan pembangunan pemukiman Yahudi dilakukan secara terstruktur untuk mengganggu demografi Palestina. Kelompok kiri di Israel punya kecenderungan memilih solusi satu negara karena terlalu rumit untuk membahas solusi dua negara. Agak sulit untuk mengimplementasikan solusi dua negara, meskipun solusi tersebut adalah solusi yang paling diharapkan oleh masyarakat internasional.

Professor Muhammad Lutfi Zuhdi : ketika perang teluk Saudi memutuskan hubungan dengan Palestina karena mereka mendukung Irak, kekosongan dukungan tersebut diisi oleh Iran. di situ terjadi. Jadi untuk kelompok-kelompok di kawasan akan sangat memungkinkan untuk bersatu (khususnya sunni-syiah) asalkan memiliki tujuan yang sama

Prof Sudarnoto Hakim : pesimisme terhadap two state solution dapat dipahami, meski demikian AS melakukan pembiaran atas solusi ini. AS merupakan pihak yang pantas disalahkan lantaran tidak mengusahakan solusi tersebut untuk terwujud, seperti membiarkan Israel membangun pemukiman dan melakukan penyerangan terhadap masyarakat Palestina. Saya tidak henti-hentinya menuntut Joe Biden untuk memenuhi janjinya ketika dirinya pidato di sumpah dan mengutip hadits “ketika melihat kemungkaran ubahlah dengan tanganmu, kemudian lisanmu, kalau tidak bisa diam.” MUI menuntut AS untuk menyelesaikan kemungkaran Israel.

Pertanyaan: Apakah Indonesia tidak bisa menggunakan ASEAN untuk menyelesaikan konflik Timur Tengah?

Broto Wardoyo : Untuk ASEAN, agak sulit karena ASEAN tidak memiliki satu suara. ASEAN menentang betul intervensi jadi agak berat bagi ASEAN untuk membantu menyelesaikan masalah Palestina. Negara besar saja mengalami kegagalan, apalagi ASEAN?

Professor Muhammad Lutfi Zuhdi : Timur Tengah ini seperti Black Hole, terlihat lubangnya tetapi dalamnya tidak ketahuan isinya apa, jadi negara-negara besar saja amblas di sana. ASEAN ini memegang kunci pengambilan kebijakan di ASEAN yang terkait dengan urusan Timur Tengah. Indonesia sendiri sudah on the track dengan mengambil jalan jalan yang lebih riil dengan memberikan dukungan diplomasi, filantropi, dan memberikan pelatihan bagi pejabat Palestina.

Professor Sudarnoto Hakim : Sulit, tetapi saya berharap Indonesia dan Malaysia bisa memainkan peranan penting dalam kepemimpinan ASEAN, khususnya dalam mengatasi isu

Palestina. Jika sulit melalui ASEAN, mungkin dapat melalui OKI. Indonesia harus mencoba menjadi sekjen OKI

Pertanyaan: Apakah normalisasi hubungan Israel Saudi akan membuka kemungkinan bagi Indonesia untuk juga menormalisasi hubungan dengan Israel?

Broto Wardoyo : Kalau Indonesia, logika politiknya berbeda antara Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah karena Indonesia tidak bertetangga dengan Israel, Jadi kita tidak akan terdampak secara langsung bila menyangkut Israel. Oleh karenanya kita dapat mendukung sepenuhnya kemerdekaan Palestina tanpa mempertimbangkan aspek geopolitik. Sebagai sebuah bangsa, kita sudah bersepakat untuk mendukung kemerdekaan Palestina, kalau itu mau direvisi itu harus menjadi revisi kebangsaan. Untuk melaksanakannya kita perlu membentuk tim khusus di Kementerian Luar Negeri untuk menyelesaikan permasalahan Palestina.

Professor Lutfi : Indonesia punya tingkat independensi kebijakan luar negeri yang tidak tertandingi. Ketika Saudi menggalang aliansi negara-negara Islam anti terorisme, Indonesia diajak untuk bergabung tetapi Indonesia menolak. Indonesia melihat aliansi tersebut sebagai upaya untuk menangkal pengaruh Iran di kawasan sehingga menolak untuk terlibat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak serta merta dapat menormalisasi hubungan dengan Israel meskipun Arab Saudi nantinya menormalisasi hubungannya.

Prof Sudarnoto : Sulit, ini kaitannya dengan konstitusi. Normalisasi akan dilakukan oleh Indonesia kalau Palestina merdeka.

Apakah AS masih menjadi penengah normalisasi, apakah akan ada negara lain yang dapat memainkan peran tersebut? seperti Cina misalnya

Professor Muhammad Lutfi Zuhdi : Saya kira Cina masih mengambil diplomasi yang lembut di Timur Tengah. Kebijakan menengahi normalisasi Saudi dan Iran merupakan sebuah hal yang mengobati dahaga Timur Tengah. Cina sedang ditunggu oleh aktor politik Timur Tengah untuk memerankan peran yang lebih dalam di Timur Tengah.

Apakah MUI akan mengeluarkan fatwa damai seperti yang dilakukan oleh Mesir, Yordania, dan UAE?

Professor Sudarnoto Hakim : Belum ada fatwa khusus mengenai isu Palestina. Tetapi MUI beberapa kali mengadakan forum yang diikuti oleh ulama dan tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam usaha penyelesaian isu Palestina. Lebih lanjut kami mencoba mengundang Fatah dan Hamas untuk bertemu di Indonesia meski Fatah menolak hadir. Sikap MUI masih mengacu pada pembukaan UUD 1945. Yang kedua AS harus lebih progresif untuk menyelesaikan isu ini dengan mengambil kebijakan luar negeri dalam kerangka kemanusiaan, perdamaian dan kesejahteraan. Ketiga kami mendorong Hamas dan Fatah untuk berdamai.

Bagaimana masyarakat dan entitas politik domestik Israel? Apakah mereka sama-sama menginginkan normalisasi ini terwujud?

Broto Wardoyo : kalau kita berbicara dalam konteks normalisasi dengan Saudi, topik ini tidak terlalu menjadi perhatian bagi masyarakat Israel. Ketika banyak gejolak penggunaan kekerasan di Tepi Barat dan amandemen sistem hukum di Israel, sehingga fokus domestik tidak mengarah ke Saudi melainkan pada stabilitas politik dalam negeri. Yang menarik adalah, jika kita amati

dari proses normalisasi sebelumnya (yordania, mesir, turki) proses normalisasi jalannya panjang, dengan membuka hubungan tidak resmi dan tertutup. Jika kita mau memainkan peran dalam penyelesaian isu Palestina, setidaknya kita harus mencontoh Turki. Turki memiliki hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi yang baik dengan Israel, tetapi mereka juga sering memberikan bantuan kemanusiaan pada Palestina. Ketika Indonesia dapat berada dalam posisi tersebut, Indonesia akan memiliki daya tawar yang cukup untuk mengubah perilaku Israel maupun Palestina, sehingga perdamaian akan lebih mudah untuk diwujudkan.



Jl. Mabas Hankam No. T65,
Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur.



Rabu, 21 Juni
2023

➔ +62811452045

➔ lab45@lab45.id

➔ www.lab45.id